

## Indikator Pembangunan Papua

### Papua Cerdas

Harapan Lama Sekolah  
**13,17 Tahun**

Baseline (2021): 13,16  
Target (2041): 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah  
**7,86 Tahun**

Baseline (2021): 7,90  
Target (2041): 9,36 – 10,37

### Papua Sehat

Umur Harapan Hidup  
**68,47 Tahun**

BASELINE (2022): 66,46  
TARGET (2024): 66,52

Prevalensi Stunting  
**13,97%**

BASELINE (2022): 30,00  
TARGET (2024): 14,00

Eliminasi Malaria  
**0 Kab/Kota**

BASELINE (2022): N/A  
TARGET (2024): N/A

### Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan  
**21,66%**

Baseline (2022): 21,33  
Target (2024): 19,03

TPT  
**4,13%**

Baseline (2022): 5,37  
Target (2024): 4,24-4,95

Realisasi Investasi  
**Rp8,07 Triliun**

Baseline (2021): Rp919,07 M  
Target (2041): Rp92,3 - Rp174,5T

### Papua Damai

Indeks Demokrasi  
**67,64**

Persentase Penyelesaian Tindak  
Pidana  
**10,13%**

## PAPUA SEHAT

**Monev Malaria dan SHEK RSUD Teluk Bintuni, RS. Apung, Puskesmas Pembantu Tahota,**



#### Peserta Kegiatan:

- Pokja Sehat Papua Barat
- Kadinkes Bintuni Petugas Puskesmas dan Bidan Tahota
- Dinkes Prov. PB, Dinkes Kab. Manokwari, Dinkes Kab. Manokwari Selatan, Dinkes Kab. Teluk Wondama, Puskesmas se Kab. Manokwari dan Puskesmas se Kab. Teluk Wondama

Pelayanan kesehatan di Papua Barat menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan pelayanan kesehatan yang tidak dapat diakomodir oleh BPJS dan rendahnya presentasi kunjungan OAP ke fasilitas kesehatan. Selain itu, kasus penyakit menular seperti malaria, TBC, dan HIV-AIDS terus meningkat dan menjadi penyebab utama kesakitan dan kematian. Keterbatasan moda transportasi juga menyebabkan kesulitan akses masyarakat OAP ke fasilitas kesehatan, sehingga memerlukan solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua.

Pemerintah telah merencanakan beberapa aksi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua, termasuk pembentukan UPTD Pengelola Jaminan Layanan Kesehatan OAP kategori PBI, pengoptimalan fungsi ATM Center, pembentukan UPTD Rumah Sakit Terapung Teluk Bintuni, dan memperkuat Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga mempertahankan tenaga kontrak di RS atau Puskesmas untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Papua.

## PAPUA PRODUKTIF

**Rapat Audiensi dengan PT. Ebier Suth Cokran (Kakao Ransiki)**



#### Peserta Kegiatan:

- Anggota BP3OKP Papua Barat
- Pokja Produktif, Sehat, Cerdas, Polhukam
- PT. Cokran

PT. COKRAN menerima total kompensasi sebesar 18 milyar, dengan 11,7 milyar telah terbayarkan dan sisanya akan dibayarkan pada tahun 2025 dan 2026. PT. COKRAN mengusulkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dan Stakeholder lain (BP3OKP) untuk meningkatkan operasional dan produksi komoditas kakao. Dukungan yang diusulkan meliputi pendanaan Pemda yang pasti, deliniasi lahan, serta pengadaan alat hilirisasi dan penjemuran kakao. Dengan dukungan ini, diharapkan produksi kakao dapat meningkat dan komoditas ini dapat diekspor ke pasar dunia.

## PAPUA CERDAS

**Audiensi Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMA & SMK Se-Papua Barat**



#### Peserta Kegiatan:

- Pokja Cerdas Papua Barat
- Bupati Fak-Fak
- Kadis Pendidikan fak-fak
- Kepala Bappeda Papua Barat dan Fak-fak

Kamis, 24 April 2025, Rapat Koordinasi Tata Kelola Pendidikan di Provinsi Papua Barat bersama BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat bersama MKKS SMA dan SMK Provinsi Papua Barat di Gedung Keuangan di Arfai Papua Barat. Agenda utama, yaitu membahas tata kelola Program Pendidikan Menengah Atas dan peninjauan kembali Pasal 1 PP Nomor 106 tahun 2021 tentang Kewenangan Pengelolaan SMA. Hasil pertemuan yaitu:

1. Peninjauan kembali Pasal 1 pada PP Nomor 106, berkenaan dengan pengelolaan SMA dan SMK pada tingkat kabupaten/kota, di kembalikan kewenangannya ke Provinsi;
2. Belanja Pendidikan bersumber dari Otsus belum memenuhi porsi minimum 30% DOK dan 35% dari DBH SDA Migas (Dinas Pendidikan hanya memperoleh 3,59%);
3. Belanja Pendidikan yang bersumber dari Otsus (70%) masih terfokus ke belanja fisik atau infrastruktur pendidikan. Sisanya hanya 30% yang diperuntukkan ke belanja non Fisik (Pengembangan SDM pada Satuan Pendidikan)

## PAPUA DAMAI

**Rapat kerja Gubernur Tanah Papua, dan Audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Barat**

#### Peserta Kegiatan:

- Para Gubernur Se-Tanah Papua
- Anggota dan Pokja BP3OKP Tanah Papua
- Ombudsman Papua Barat



Masih belum sinkron antara perencanaan di Kabupaten dengan RPJMD Provinsi maupun RPJMN. Perluantisipasi peningkatan agresivitas dan gangguan keamanan oleh kelompok separatis bersenjata teoritis papua. Banyak pengaduan masyarakat kepada Ombudsman terhadap pelayanan publik yang dinilai merugikan. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Ombudsman dengan Lembaga-Lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislative dan oragnisasi lainnya

Rencana penyusunan RPJMD Kabupaten harus setara dengan RPJMD Provinsi maupun RPJMN. Seluruh elemen mampu bahu membahu menjaga kondusifitas masyarakat umum untuk mencegah bentuk-bentuk propaganda. Harus dibentuk Unit Pelayanan Terpadu di setiap Instansi guna menyerap atau menampung keluhan/persoalan.